

Frequently Asked Questions (FAQ) Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)

No	Pertanyaan/Kendala	Jawaban
1	Kapan jadwal perekaman, perubahan, dan penghapusan (RUH) nomor identitas pelanggan?	Dilakukan setiap tanggal 21 sampai dengan tanggal terakhir sebelum bulan pembayaran Artinya perekaman ID pertama kali penggunaan PPP dilakukan sampai dengan tanggal 30 September 2024
2	Satker selama ini tidak tahu berapa no internet dan no pairing telkom?	1. Satker dapat mengetahui no internet, telepon, no pairing lainnya pada dokumen tagihan yang dikirimkan oleh Telkom 2. Satker dapat memantau nomor pairing yang belum direkam di SAKTI yang dapat terlihat dari monitoring pada tautan https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMWRmYjQ3MTktZjc2YS00MWVmLTNmNjEtZTA2NmU3ZDVhMmYxliwidCI6ImVkNmZiMzY2LTgzMjltNDZmMy05MTVILWM0ZDAzN2E0NTRhOSIsImMiOjEwfQ%3D%3D Keterangan: • Tabel ini merupakan data ID pairing yang belum direkam oleh satker • Atas ID Pairing yang disampaikan Telkom ini, satker agar melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum direkam di SAKTI untuk memastikan kebenaran kepemilikan • Jika kolom buss.partner memiliki kode yang sama, maka itu adalah pairingnya • Jika satker menerima invoice bulanan dari Mitra setempat, lampiran invoice berupa ID bisa langsung direkam di SAKTI tanpa perlu cek pairing pada dashboard ini
3	Idpel dimasukan pada SAKTI namun notifikasi data tidak ditemukan?	Satker rekam idpel PLN pada SAKTI menu referensi data pelanggan, apabila setelah dimasukkan data tidak ditemukan silahkan menginput idpel tersebut pada tautan https://s.id/InventarisasiID

		dan lihat status perubahan Kogol 2 nya pada https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMzA5MTcwNTgtOTM1MC00NGQ4LWFmYTktZjQ1MDY5NzkyNGE5liwidCI6ImVhNmZiMzY2LTgzMjltNDZmMy05MTVILWM0ZDAzN2E0NTRhOSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
4	PLN memiliki kogol 2, bagaimana satker mengetahuinya?	Satker rekam idpel PLN pada SAKTI menu referensi data pelanggan, apabila setelah dimasukkan data tidak ditemukan silahkan menginput idpel tersebut pada tautan https://s.id/InventarisasiID dan lihat status perubahan Kogol 2 nya pada https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMzA5MTcwNTgtOTM1MC00NGQ4LWFmYTktZjQ1MDY5NzkyNGE5liwidCI6ImVhNmZiMzY2LTgzMjltNDZmMy05MTVILWM0ZDAzN2E0NTRhOSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
5	Nomor meter PLN untuk tagihan prabayar apakah perlu dilakukan inventarisasi?	Nomor Meter PLN, agar dicatat/input semua Nomor Meter baik gedung/bangunan kantor maupun rumah dinas tidak berpenghuni, dengan kondisi hanya Nomor Meter PLN pascabayar dan dibayarkan melalui APBN. Sedangkan Nomor Meter PLN prabayar (token) saat ini tidak diperlukan dicatat dalam form tersebut. https://s.id/InventarisasiID Perekaman Nomor Meter PLN dilakukan satu per satu lihat statusperubahan Kogol 2 PLN pada https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMzA5MTcwNTgtOTM1MC00NGQ4LWFmYTktZjQ1MDY5NzkyNGE5liwidCI6ImVhNmZiMzY2LTgzMjltNDZmMy05MTVILWM0ZDAzN2E0NTRhOSIsImMiOjEwfQ%3D%3D

		MTVILWM0ZDAzN2E0NTRhOSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
6	Apakah ada hal penting dalam perekaman no id di SAKTI?	Syarat dalam perekaman nomor identitas pelanggan di SAKTI adalah sebagai berikut: 1) Nomor meter PLN yang direkam di SAKTI pada K/L kecuali Kementerian Pertahanan dan POLRI, wajib memiliki kode golongan (Kogol) 2 yaitu Pelanggan Instansi. 2) Perekaman nomor internet hanya dapat dilakukan untuk penggunaan indihome saja. 3) Perekaman nomor telepon Telkom wajib dilakukan perekaman pairing-nya, karena tagihan melalui PPP disampaikan secara detail yaitu ditagihkan masing-masing, baik telepon maupun internetnya. Pengecekan pairing nomor identitas pelanggan Telkom dapat dilihat melalui menu di SAKTI. 4) Perekaman nomor meter/nomor telepon/nomor internet di SAKTI cukup dilakukan sekali saat awal implementasi kecuali jika terdapat perubahan berupa penghapusan nomor lama/perekaman nomor baru maka dilakukan mengikuti jadwal RUH.
7	Batas batas penting dalam PPP	Setiap tanggal 21 s.d tanggal terakhir sebelum bulan pembayaran (30 Sept 2024) dilakukan RUH Perekaman ID pelanggan baik untuk PLN/Telkom Tanggal 8 s.d 11 Oktober 2024 dilakukan perekaman SPP dan SPM
8	Pada saat piloting pembayaran common expenses melalui platform, apakah dilarang melakukan pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi secara konvensional (melalui KKP, token, atau manual)?	Mekanisme pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi melalui platform, dimulai dengan tahapan pendaftaran ID Pelanggan listrik dan telekomunikasi melalui aplikasi SAKTI. Terhadap data ID Pelanggan yang telah didaftarkan tersebut, maka pembayarannya hanya dapat dilakukan melalui platform (secara sistem, pembayaran melalui cara lainnya akan tertutup). Hal tersebut untuk menghindari adanya pembayaran

		ganda/dobel.
9	Bagaimana jika terjadi dobel bayar (pembayaran melalui platform dan konvensional)?	Hal tersebut dimitigasi melalui pendaftaran ID Pelanggan pada SAKTI. Tim Pengelola Platform secara periodik melakukan rekonsiliasi pembayaran dengan pihak mitra (PT PLN & PT Telkom), jika ditemukan kelebihan atau dobel bayar, maka diselesaikan dengan mekanisme pengembalian belanja melalui SSPB/SSBP.
10	Bagaimana mekanisme buat SPP	Salah satu pengujian yang dapat dilakukan PPK adalah melakukan pengecekan keabsahan tanda tangan elektronik yang disampaikan mitra. Pada user staf PPK, pilih Pembayaran – RUH Pembayaran – Catat/Ubah SPP. Pada tampilan catat/ubah SPP sebagaimana pada gambar berikut, pilih jenis SPP yang digunakan yaitu 231 LS non kontraktual – Belanja Operasional. Selanjutnya pilih jenis pembayaran yaitu PLN/Telkom. PLN/Telkom akan menyampaikan informasi tagihan outstanding penggunaan langganan setiap nomor identitas pelanggan sampai dengan periode tagihan pada bulan berjalan. Supplier dan nomor rekening PLN/Telkom sudah otomatis dipilih oleh sistem.
11	Apabila dalam akun langganan listrik ada dua data, bagaimana mekanisme pendetilannya?	Data tagihan listrik merujuk pada nomor meteran sehingga dapat dipastikan tidak terjadi dua data. Detil data tagihan listrik dikirimkan secara otomatis dari sistem PLN kepada aplikasi SAKTI, dimana detil data tersebut dapat dicapture oleh Dashboard Platform
12	Jika terdapat tagihan listrik dan telepon yang belum dibayarkan karena keterlambatan proses SPM, apakah pembayaran melalui platform dapat dirapel / carry forward ke bulan depan	Data tagihan yang dikirimkan oleh sistem PT Telkom dapat meliputi data tagihan bulan berjalan dan bulan sebelumnya. Pembayaran tagihan bulan sebelumnya dapat dipisah atau dijadikan satu dengan tagihan bulan berjalan. Pemilihan tersebut menjadi kewenangan PPK dalam pembuatan SPP.

		Pada tagihan listrik tidak dapat dirapel, hanya bisa dibayarkan pada bulan berkenaan
13	Perekaman referensi data pelanggan itu sudah termasuk pendaftaran supplier atau belum? Untuk pendaftaran supplier apakah harus didaftarkan dahulu pada masing-masing KPPN, tidak secara terpusat?	Perekaman data pelanggan terpisah dengan pendaftaran supplier. Pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi menggunakan data supplier tunggal yang dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja dengan berkoordinasi dengan KPPN setempat
14	Status ID Pelanggan PLN yang dapat didaftarkan hanya yang berstatus milik pemerintah (kode golongan 2), Bagaimana cara mengetahuinya?	- Sistem PLN telah memberi kode atas ID Pelanggan yang masuk kategori satker pemerintahan sebagai kode golongan/ KOGOL 2. PPP hanya dapat merekam ID Pelanggan PLN KOGOL 2, sehingga jika satker tidak dapat merekam ID Pelanggan PLN artinya ID Pelanggan PLN tersebut belum KOGOL - Solusi yang dapat dilakukan adalah satuan kerja dapat berkoordinasi dengan KPPN, Tim Pengelola Platform, atau Unit PT PLN di daerah untuk perubahan KOGOL menjadi 2 Satker rekam idpel PLN pada SAKTI menu referensi data pelanggan, apabila setelah dimasukkan data tidak ditemukan silahkan menginput idpel tersebut pada tautan https://s.id/InventarisasiID dan lihat status perubahan Kogol 2 nya pada https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMzA5MTcwNTgtOTM1MC00NGQ4LWFmYTktZjQ1MDY5NzkxNGE5liwidCI6ImVkNmZiMzY2LTgzMjltNDZmMy05MTVILWM0ZDAzN2E0NTRhOSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
15	Saat terjadi interkoneksi antara core system dengan sistem mitra, apakah performance kecepatan akses sistem tetap dapat terjaga?	Dalam melakukan interkoneksi core system (SPAN, SAKTI, Gaji Web) dengan sistem pendukung atau sistem mitra, terlebih dahulu dilakukan persyaratan dan pengujian untuk memastikan keamanan, keandalan, dan

		performance dari masing-masing sistem
16	Apakah setelah piloting pembayaran melalui platform dijalankan, KPPN masih berperan dalam pengujian SPM?	Sesuai dengan ketentuan yang ada, KPPN tetap melakukan penelitian dan pengujian terhadap SPM yang diajukan oleh satker piloting. Bentuk penelitian dan pengujian SPM yang menggunakan mekanisme platform, mengikuti regulasi dan SOP yang ditetapkan.
17	Satker belum lengkap menginput/meregistrasi nomor ID Pelanggan Telkom yang digunakan secara berpasangan / pairing (nomor telepon dan nomor indihome baru diinput salah satunya). Bagaimana solusinya?	Pastikan pada saat rekam di SAKTI, satker sudah mengetahui nomor pasangan/pairing masing-masing ID Pelanggan Telkom yang dipakai. Untuk mengetahui nomor pairing jika belum diketahui, dapat menghubungi Tim Pengelola Platform, atau Unit PT Telkom di daerah.
18	Bagaimana cara mengetahui indikasi awal untuk nomor pairing ID Pelanggan Telkom yang belum terregister salah satunya?	Anda akan mendapatkan tagihan anomaly (kurang dari biasanya secara signifikan), misal tagihan biasanya Rp 500rb, namun ketika masuk PPP tagihan yang muncul hanya Rp.36rb, ini terindikasi nomor Indihomenya belum direkam di SAKTI. Atau sebaliknya tertagih 464rb, artinya terindikasi nomor teleponnya belum direkam di SAKTI.
19	Bagaimana jika terdapat ID Pelanggan Telkom yang terlupa untuk direkam di SAKTI?	Tidak perlu khawatir, perekaman ID Pelanggan dapat dilakukan pada bulan selanjutnya setiap periode tanggal 21 s/d akhir bulan
20	Apa yg terjadi jika hanya sebagian data ID Pelanggan Telkom yang direkam di SAKTI?	Satker bisa partial membayar tagihannya, namun belum dapat status lunas sampai lengkap pembayarannya. Tagihan pada ID Pairing Telkom yang telah direkam di SAKTI pada periode selanjutnya akan di-carry forward di dalam sistem ke bulan berikutnya, sehingga pada bulan N+1 akan ada dua periode tagihan rapel (tagihan bulan berjalan ditambah tagihan di salah satu nomor yang belum dibayarkan tagihannya dibulan sebelumnya).
21	Satker dengan tidak sengaja melakukan pembayaran tagihan terhadap nomor yang sama lebih dari satu kali (dilakukan di PPP dan di kanal lain)	Untuk menghindari kejadian tersebut diharapkan satker (khususnya peserta Perdana) untuk memastikan halhal berikut : - Satker dengan tidak sengaja melakukan pembayaran tagihan terhadap nomor yang sama lebih dari satu kali (dilakukan di PPP dan

		di kanal lain) Jika selama ini melakukan pembayaran via auto debit/ factoring, agar diberhentikan dahulu layanannya. - Jika memang berkomitmen akan melakukan pembayaran via PPP, maka abaikan tagihan di kanal lain dan tidak dilakukan pembayaran melalui kanal lain.
22	Kapan periode perekaman ID Pelanggan di aplikasi SAKTI?	Setiap tanggal 21 sampai dengan akhir bulan.
23	Kapan tagihan common expenses (PLN dan Telkom) muncul/terbit di SAKTI?	Informasi tagihan untuk belanja jasa listrik/ jasa telekomunikasi disiapkan oleh Mitra paling lambat tanggal 7 setiap bulan atas ID Pelanggan yang telah direkam di SAKTI sebelumnya. Tagihan akan muncul di SAKTI pada tanggal 8 setiap bulan
24	Kapan batas proses pembuatan SPP dan SPM di aplikasi SAKTI?	Paling lambat tanggal 13 setiap bulan, dalam hal tanggal tersebut adalah hari libur maka pada hari kerja sebelumnya
25	ID apa saja yang dapat direkam di SAKTI dalam rangka pembayaran common expenses melalui PPP	Untuk saat ini, PPP baru melakukan kerja sama dengan sistem mitra (PLN dan Telkom). Ada kemungkinan dilakukan perluasan dengan syarat sistem mitra sudah settle. ID PLN yang dapat direkam di SAKTI adalah hanya ID pascabayar. ID Telkom yang direkam di SAKTI hanya telepon dan indihome. Untuk jenis ID lainnya dibayarkan di luar PPP.
26	Bagaimana dengan satker yang pembayaran tagihan internetnya melalui perjanjian kontrak tahunan?	Dikecualikan dari pembayaran dengan PPP
27	Gagal validasi SPP "Err: Maaf proses simpan tidak berhasil - Fault occurred while processing"	Pagu tidak cukup Sesuai keputusan PPK, alternatif: 1) revisi pagu 2) mapping COA, untuk mapping COA harus semua ID
28	Jenis SPM 231 hanya bisa dikirim sebelum pukul 15.00	Satker telat OTP SPM Satker harus proses sebelum tanggal 16 s.d. pukul 15.00 atau hari kerja sebelumnya jika hari libur
29	Sudah setuju SPM, TTE tidak muncul	Satker belum melakukan OTP Setelah OTP baru muncul TTE, bisa dicek dengan cetak arsip SPP atau ulangi langkah

30	PPP hanya beban RM ya? yg beban PNBPN boleh tidak PPP kah?	khusus RM
31	Error supplier dengan rekening ... - PT ... tidak ditemukan	Supplier belum diimport Import supplier sesuai panduan
32	Kendala Setujui Tagihan "Err: Maaf proses simpan tidak berhasil - java.lang.Exception: DS_ERROR 500 - Internal Server Error"	Gangguan BSSN saat sign
33	Detail COA pada Lampiran Surat Permintaan Pembayaran tidak muncul	Kemungkinan terjadi pada satker setelah revisi Koreksi COA dengan membuat SPP 516 Mapping COA: Modul Pembayaran - Referensi - Mapping COA
34	TTE tidak bisa	Karena NIK berubah Membuat tiket hai, membuat perubahan NIK di HRIS koordinasi dengan setditjen UE1 nya
35	Supplier PLN dan Telkom menggunakan supplier yang mana?	9901235400000000 PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI 120101000014303 PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
36	Apabila dalam pembayaran tagihan eksisting PLN/TELKOM dilakukan dengan UP bagaimana penyelesaiannya?	Apabila tagihan PLN/TELKOM satker telah memenuhi ketentuan, maka satker wajib menggunakan PPP dalam pembayaran tagihan bulan September 2024.
37	Apakah supplier yang telah diimport dengan menu interkoneksi SPAN masih memerlukan OTP saat mengajukan PPP?	Tidak perlu
38	Apakah 1 SPP dapat berisi berbagai nomor pelanggan?	1 SPP bisa dimasukkan lebih dari 1 id pelanggan/nomor telkom dalam 1 jenis mitra yang sama
39	Kolom ID pelanggan tidak muncul pada baris data pelanggan Telkom?	Kolom ID pelanggan akan muncul setelah 1 siklus
40	Bagaimana jika nama pelanggan menggunakan nama pegawai?	Apabila selama ini dibayar oleh DIPA Satker maka masuk dalam kategori pembayaran dengan PPP
41	Langganan indihome/astinet/telkom solution dengan kontrak tahunan?	Langganan telkom dengan kontrak antara satker dengan telkom dikecualikan dari pembayaran melalui PPP

42	Satker memiliki tagihan bulanan untuk kartu halo, apakah masuk PPP?	Kartu halo merupakan produk telkomsel, sehingga tidak masuk PPP
43	Produk telkom/PLN apa saja yang dapat masuk PPP?	Telkom : indihome, indibiz, speedy, telepon, pijar sekolah PLN : listrik pascabayar (bukan token) -> yang pengadaannya tidak menggunakan kontrak Pijar Sekolah adalah platform pendidikan dibawah naungan telkom indonesia yang dapat membantu sistem pembelajaran digital terpadu
44	Apabila selama ini bayar tagihan internet menggunakan akun 522119/521111 apakah tetap boleh mapping dengan akun tsb?	Boleh
45	Jenis sumber dana apa saja yang bisa dan tidak menggunakan PPP?	1. RM, bisa melalui PPP 2. PNPB, bisa melalui PPP 3. BLU - Jika alokasi bayar tagihan telkom dan PLN pakai RM, bisa melalui PPP - Jika alokasi menggunakan PNP tidak melalui PPP 4. Hibah, tidak melalui PPP
46	Apabila gedung kantor saat ini sewa apakah wajib PPP?	Dalam hal tagihan listrik dan telkom dibayar ke PLN dan telkom tanpa perantara, maka wajib PPP Kecuali dibayar ke selain pihak PLN dan telkom maka dibayar dengan mekanisme diluar PPP
47	Untuk PLN yang direkam no meter atau idpel?	No meter untuk PLN prabayar Id pel untuk PLN pascabayar dan masuk PPP yang berjumlah 12 digit
48	Terdapat tagihan PLN bulan Agustus 2024 yang belum dibayar, apakah pembayaran nya menggunakan mekanisme PPP?	PPP digunakan untuk pembayaran tagihan bulan September 2024 dan seterusnya sehingga tagihan sebelum tagihan bulan Sept 2024 menggunakan kanal lain diluar PP
49	Satker memiliki kantor di berbagai daerah, apakah nantinya tidak akan terjadi double bayar?	Mekanisme pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi melalui platform, dimulai dengan tahapan pendaftaran ID Pelanggan listrik dan telekomunikasi melalui aplikasi SAKTI. Terhadap data ID Pelanggan yang telah didaftarkan tersebut,

		maka pembayarannya hanya dapat dilakukan melalui platform (secara sistem, pembayaran melalui cara lainnya akan tertutup). Hal tersebut untuk menghindari adanya pembayaran ganda/dobel.
50	Bagaimana mekanisme perubahan nama pelanggan pada PLN dan TELKOM?	Silahkan datang ke TELKOM atau PLN UP3 Padang atau menghubungi kontak berikut: PLN : Pak Doni : 081270392110 Telkom : Bu Sendra : 085274657602
51	Bagaimana apabila satker kesulitan memenuhi syarat GUP jika tagihan listrik dan telkom saat kedepan dibayar dengan PPP (LS non kontraktual)?	Satker dapat melakukan penihilan sebagian dengan mekanisme setor atau GUP nihil sebagian
52	1 gedung digunakan oleh beberapa satker yang memiliki masing-masing dipa dengan pembayaran tagihan setiap bulan bergantian, bagaimana mekanisme di SAKTI?	Setiap bulan pembayaran yang dibayar oleh suatu satker, maka setiap tanggal 21 s.d akhir bulan sebelum bulan pembayaran direkam pada menu referensi data pelanggan, apabila periode berikutnya yang membayar satker lainnya silahkan dihapus data idpel tsb dari satker sebelumnya
53	Apakah disediakan peraturan terkait dengan PPP?	Kumpulan regulasi, manual book, materi sosialisasi, petunjuk teknis, dan video tutorial dapat diakses pada s.id/PPP010 atau s.id/pandaibana
54	Apakah rumah dinas pembayaran tagihan internet dan listrik melalui PPP?	Hanya rumah dinas yang tidak berpenghuni saja yang tagihan nya dibayar menggunakan dipa satker dan menggunakan PPP sesuai regulasi yang dapat diakses pada s.id/PPP010 atau s.id/pandaibana